WASIAT WAJIBAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (BW)

Mochamad Alfian Bachtiar¹, Dipo Wahjoehono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945

alfan_bachtiar_09@gmail.com, dipo@untag-sby.ac.id

Abstract

In Islamic Law, adopted children are different from biological children in the division of inheritance. The biological child is entitled to an inheritance, while the adopted child is not an heir, so he not is entitled to an inheritance. However, he is entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance through a mandatory will. This becomes a question, what happens when parents want to give inheritance to their adopted children. This research discusses the mandatory will for adopted children to get inheritance by analyzing the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. This research is a type of literature research. The nature of his research is descriptively analytical, using a qualitative approach. The primary data source used is the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg while secondary data in the form of books and journal articles. The collected data is then organized, edited and analyzed through deductive analogies. The results of the study yielded two conclusions. First, in Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg, the judge granted inheritance rights to adopted children through compulsory wills under article 209 of the Compilation of Islamic Law and the benefit of adopted children. Because both parents have died, the adopted child gets 1/6 of each adoptive parent so that it does not exceed 1/3 of the inheritance. Second, from the Islamic law perspective, Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg on the will of the obligatory has been in accordance with Islamic law.

Keywords: Adoption, compulsory wills, inheritance, Islamic law.

Abstrak

Dalam Hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Anak kandung berhak mendapat warisan, sedangkan anak angkat ia bukan ahli waris sehingga tidak berhak mendapat warisan. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tua ingin memberikan peninggalan kepada anak angkat. Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg sedangkan data sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg, hakim memberikan hak waris pada anak adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak angkat mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat wajibah telah sesuai dengan Hukum Islam.

Kata kunci: Adopsi, wasiat wajibah, waris, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Setiap permasalahan yang dilakukan oleh umat Islam mengacu pada hukum Islam (wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah), baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun hubungan dengan manusia.¹ Salah satu ilmu dalam Hukum Islam adalah Hukum Kewarisan atau biasa disebut hukum waris. Masalah warisan dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan keterangan yang konkrit.²

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa adanya perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarga.³ Meski demikian, ada pasangan suami istri yang sulit memiliki anak atau tidak bisa memiliki anak kandung sendiri, sehingga mereka mengangkat anak (adopsi).⁴

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri.⁵ Proses pengangkatan anak adopsi dilakukan melalui lembaga pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum.⁶

Di Indonesia, kegiatan pengadopsian diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Pelaksanaan adopsi anak akan berakibat hukum pada beberapa perbuatan hukum diantaranya terkait hak pendidikan, hak waris, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkat.

Hukum Islam juga membolehkan adanya adopsi anak dengan beberapa ketentuan di antaranya tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung atau orang tua biologis. Anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak boleh

---

¹ Z. Abdillah, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al- Qu'ran Dan Hadis." 1 (2019).

² Ibid., 10.

³ Jiiy Ji'ronah Muayyanah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," 2010.

⁴ Ibid., 2.

⁵ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2014), 302, <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.

⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

menggunakan nama dari orang tua angkatnya dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dari anak angkatnya.⁷

Perkara hak waris dalam hukum Islam, anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris namun anak angkat berhak mendapatkan hibah atau wasiat dari orang tua angkat yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Pada dasarnya anak angkat (adopsi) tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Namun ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam pembagian waris pada anak angkat yaitu dengan pengalihan harta dalam bentuk hibah dan wasiat.

Secara normatif, anak angkat tidak mendapatkan warisan karena sebab menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik hubungan darah karena keturunan atau sebab perkawinan.⁸

Dalam Putusan Pengadilan No.35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hakim memberikan hak waris pada anak angkat (adopsi) serta memberikan kedudukan pada anak angkat sebagai ahli waris seperti halnya pewaris lainnya. Hal ini didasari karena adanya hukum yang memberikan hak waris pada anak angkat yaitu dengan wasiat wajibah yang selama ini dipakai oleh hakim dalam memberikan hak waris pada anak angkat. Berdasarkan hal di atas, artikel ini mengkaji bagian harta waris pada anak angkat dengan judul wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris (studi Putusan No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg tentang wasiat wajibah).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan anak angkat diantaranya: Skripsi karya Suyanti berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa",⁹ Skripsi Karya Weni Sarlina berjudul "Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata",¹⁰ Skripsi Karya Alfun Ni'matil Husna berjudul "Status Kewarisan Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia",¹¹ Skripsi Karya Rahmat Rizki Putra

---

⁷ Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum*, Vol. 4 no. 5 (2016), 55-57.

⁸ M Alfian Fathoni, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat" Vol. 1 (2018).

⁹ Suyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Jawa" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁰ Weni Sarlina, "Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia," 2020. (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2020).

¹¹ Alfun Ni'matil Husna, "Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," 2017. (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2008).

berjudul “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Adat Aceh dan KHI (Studi dalam Masyarakat Adat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara)”¹², dan skripsi Hikmatul Mahfiyyah berjudul “Pewarisan terhadap Anak Angkat sebagai Ahli Waris Tunggal menurut Hukum Adat Jawa” yang membahas tentang anak angkat sebagai ahli waris tunggal dalam mendapatkan warisan menurut hukum adat Jawa.¹³ Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa meski terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini, maka penelitian ini meneruskan penelitian sebelumnya dengan fokus membahas wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu: Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg. Sumber data sekunder adalah buku dan artikel jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, maka penulis kemudian segera melakukan analisis secara kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Anak Adopsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, istilah pengangkatan anak disebut dengan *tabanny* yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Ada dua bentuk *tabanny* dalam hukum Islam salah satu di antaranya adalah bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya.¹⁴

Tabanny yang dilarang dalam Islam merupakan *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan segala hak- hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua aslinya, serta menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

---

¹² Rahmad Riski Putra, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Di Tinjau Dari Hukum Adat Aceh Dan KHI (Studi Di Dalam Masyarakat Adat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara)” (sumatera utara, 2019).”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019).

¹³ Hikmatul Mahfiyyah, “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa” (Universitas Jember, 2016).

¹⁴ Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”, 52.

Tabanny (pengangkatan anak) yang dianjurkan adalah pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT. Pengangkatan anak dilakukan dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain sebagainya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.¹⁵

Dalam Islam, adopsi tidak menempelkan nasab orang tua angkat kepada anak adopsi. Sehingga tidak mempengaruhi pernikahan atau mahram dan warisan. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zaynab yang merupakan mantan istri dari putra angkatnya yang bernama Zayd Bin Haritsah. Adopsi anak ini juga tidak diakui sebagai dasar dan penyebab pewarisan karena prinsip utama pewarisan adalah hubungan darah atau *arham*.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat adalah anak yang anaknya dialihkan dan dilingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalnya pada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur didalamnya berkaitan dengan anak angkat. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa adanya putusan pengadilan menjadi dasar penetapan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bermuara pada terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena di mata hukum pengangkatan anak (adopsi) hanya bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak itu sendiri. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan anak, adopsi merupakan suatu tindakan hukum yang

---

¹⁵ Ibid., 54.

¹⁶ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Islam," *An-Nuha* 7 (2020): 98.

¹⁷ Abd Hadi Moh. Nashiruddin Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Pembagian Harta Warisannya," *Ummul Qura* XV, no. 1 (2020): 16.

dapat memindah alihkan dari lingkungan sebelumnya yang belum dalam penguasaan orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab dalam lingkup pertanggung jawaban yaitu perawatan, pendidikan dan membesarkan anak di lingkup orang tua angkat. Pengaturan lainnya juga terdapat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang mengatur mengenai pengertian yang sama terhadap pengangkatan anak.¹⁸

Pembagian Harta Warisan Anak Angkat dalam Islam

Harta warisan menurut Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih pada ahli waris. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli waris.¹⁹

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam kewarisan dalam Islam. Rukun-rukun kewarisan tersebut adalah:

- a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik secara haqiqi (dapat dibuktikan dan disaksikan secara faktual) maupun secara hukmi (karena putusan atau pertimbangan yang ditetapkan hakim), dan taqdiri (atas persangkaan yang dianggap pasti).
- b. Ahli Waris, yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama.
- c. Warisan, yaitu harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan, utang, zakat harta, dan hibah atau wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga hartanya.

Sedangkan syarat-syarat kewarisan dalam Islam adalah:

- a. Matinya pewaris (orang yang mewariskan)

Sebagai akibat kematian pewaris ialah warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian pewaris ada 3 macam yaitu mati haqiqi (kematian yang dapat dibuktikan dan disaksikan secara faktual), mati

---

¹⁸ Ida Ayu Made Manik Nareswari, "Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Kertha Wicara* 10, no. 2 (2021).

¹⁹ Moh. Nashiruddin Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Pembagian Harta Warisnya," *Ummul Quran* XV, no. 1 (2020): 26-27.

hukmi (dianggap mati karena putusan atau penetapan hakim), dan mati taqdiri (kematia atas persangkaan yang dianggap pasti).

b. Hidupnya ahli waris

Ahli waris yang menerima harta warisan disyaratkan harus benar-benar hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Harus ada ketetapan dari hakim apabila tidak diketahui dengan pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal. Selain itu, disyaratkan tidak adanya penghalang mewarisi, seperti karena perbudakan, pembunuhan, dan beda agama.

Lebih jauh lagi dalam Islam menerangkan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan haruslah memenuhi beberapa ketentuan yaitu hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan, syarat-syarat pewarisan, rukun waris, sebab-sebab memperoleh warisan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak mengenal anak angkat (adopsi) yang statusnya disamakan dengan anak kandung atau dinasabkan sebagai anak kandung, kecuali hanya sebatas untuk menyantuni anak tersebut. Demikian pula dalam Islam, anak angkat tidak dapat menerima warisan kecuali ada wasiat dari pewaris. Hal itu tidak melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Anak angkat juga tidak termasuk dalam urutan dalam ahli waris yang berhak menerima warisan kecuali ada wasiat dari pewaris dan anak angkat tersebut tidak harus dipersamakan statusnya dengan anak kandung.²⁰

Pembagian Harta Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa instrumen hukum. Diantaranya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983, undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Sahnya Pengangkatan Anak. Dalam KUH Perdata (BW) anak angkat masuk dalam anak luar kawin yang kemudian diangkat menjadi anak yang harus tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris yang tertera dalam pasal 10 *Staatblad* No. 129 Tahun 1927. Dalam *Staatblad* No. 129 tahun 1927, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat. Anak tersebut dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Jadi, seorang anak di luar

---

²⁰ Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat," *Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006).

kawin pun yang telah diakui dan disahkan secara hukum dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasarkan nilai adat istiadat masyarakat setempat.²¹

Penerapan dalam perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum Negara Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung. hingga dalam mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan yang digunakan dan menjadi rujukan dalam penentuan hukum dalam masalah hak anak adopsi menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Sebagai solusi psengkakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakannya dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam bab V tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memeriksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan pada orang tertentu. Hal tersebut disebut wasiat wajibah karena²²:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan ahli waris.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pemberian wasiat juga dapat dibatalkan bilamana calon penerima wasiat telah melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan sebagai calon penerima wasiat. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.²³

---

²¹ Sintia Stela Karaluhe, "Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris," *Lex Privatum IV*, no. 1 (2016).

²² Mifa Al Fahmi, "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 87.

²³ *Ibid.*, 90.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat dalam pasal 175 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajiban tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode *ijtihad istishab*, *urf* dan *istihsan*. Peraturan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional. Bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai Negara Islam. Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu:²⁴

- a. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.
- b. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepadad anak yang wajib dibuat wasiat jumlah diwasiatkan dengan jalan yang seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah maka wajiblah disempurnakan pada saat itu.

Pengaturan tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut Hukum Adat yang mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat, waris menurut Hukum Islam yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Islam, dan waris menurut Hukum perdata (BW) yang mengacu pada hukum perdata atau undang-undang peninggalan Belanda (*Burgelijk Wetboek*).²⁵

Dalam menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris, mengacu pada kemauan para pihak karena semua sistem

---

²⁴ Sintia Stela Karaluhe, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris," *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 1 (2016), 171.

²⁵ *Ibid.*, 173.

tersebut berlaku sampai sekarang. Apabila warga negara yang beragama Islam, bisa menggunakan sistem hukum Islam yaitu KHI dalam penentuan masalah waris atau bisa juga menggunakan hukum adat dan bagi orang yang non-muslim bisa menggunakan hukum perdata atau BW dalam penyelesaian sengketa waris tersebut.

Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh hakim sebagai aparat Negara yang memaksa atau memberi keputusan tentang wajib wasiat yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu termasuk pada anak angkat.²⁶

Dalam penentuan putusan bagian warisan bagi anak angkat juga menggunakan yurisprudensi sebagai acuan hukum yang digunakan dalam menentukan bagian waris anak adopsi. Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkenan dengan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan pengadilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama. Kaidah yurisprudensi yang digunakan hakim dalam penentuan bagian harta untuk anak angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 245 K/AG/1997 tentang hak mewarisi anak dengan kaidah hukum “sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI bahwa anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.”²⁷

Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya memberikan wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris.²⁸

Dampak Pelaksanaan Wasiat Wajibah dalam Pembagian Warisan pada Anak Angkat

Posisi anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung, misal dalam hak waris. Seorang anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya. Namun

---

²⁶ Karin Aulia Rahmadhanty, “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia,” *Normative* 6, no. 2 (2018): 68.

²⁷ Nia Fitriyani, “Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis” (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, n.d.).

²⁸ Habiburrahman, “Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat,” *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 129.

ia berhak mendapatkan 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya atau wasiat wajibah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pertimbangan hukum serta kemaslahatan. Selain itu, anak angkat juga sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang anak yaitu patuh terhadap orang tua, menyayangi orang tua dan merawat orang tua jika mereka sudah tua renta. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa anak angkat juga berhak mendapatkan wasiat wajibah karena mereka juga berjasa merawat orang tua angkatnya. Namun perlu dipahami bahwasanya wasiat wajibah tidak dibuat oleh pewaris. Tetapi Pengadilan Agama dapat memberikan putusan pemberian wasiat wajibah bagi mereka yang dapat menerimanya yaitu anak angkat atau orang tua angkat yang diatur dalam pasal 209 KHI.

Selain adanya putusan terkait wasiat wajibah. Wasiat wajibah juga memberikan dampak positif bagi anak angkat diantaranya: *pertama*, anak angkat akan belajar menjadi lebih mandiri semenjak orang tua angkatnya meninggal sebab tidak ada lagi keluarga yang merawatnya. *Kedua*, anak angkat merasa bahwa dia sangat berharga bagi orang tua angkatnya meskipun ia bukan anak kandung. *Ketiga*, anak angkat akan merasa benar-benar menjadi anak kandung walau kedudukan dalam waris dia tidak berhak, tetapi karena adanya putusan Pengadilan Agama dia tetap berhak mendapatkan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris. Dalam KHI mengatur adanya wasiat wajibah guna memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa antara anak angkat dan anak kandung terhadap harta waris. Sebab anak angkat bukanlah ahli waris, sedangkan dalam kenyataannya terkadang anak angkat lebih baik dari anak kandung sendiri sehingga Pengadilan Agama mempertimbangkannya dan memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak angkat.²⁹

Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg dalam Menentukan Bagian Warisan Anak Angkat

Putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg merupakan perkara tentang kewarisan yang ditangani atau diselesaikan dalam pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dalam perkara ini, hakim menetapkan bagian masing-masing para ahli waris serta menetapkan siapa sajakah yang menjadi ahli waris pewaris tersebut. Sehingga nantinya dapat

---

²⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017).

menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dalam perkara tersebut yang ditetapkan menjadi ahli waris dari istrinya (almh. H) adalah suami dari pewaris yang kemudian juga meninggal dunia setelah istrinya, 4 saudara laki-laki kandung dan anak angkat perempuan. Hakim juga menetapkan ahli waris dari suami yang meninggal setelah istrinya (Alm. MA) yaitu istri kedua, 6 saudara laki-laki kandung dan seorang anak angkat perempuan dilanjutkan dengan pembagian masing-masing ahli waris.³⁰

Kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya menegaskan bahwa waris adalah penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Maka yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa waris dalam perkara ini adalah kejelasan status pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris (para penggugat/tergugat). Hal ini juga berlaku untuk status atau hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri. Kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.

Dalam putusan ini anak angkat menjadi bagian dari ahli waris yang sah namun dengan menggunakan wasiat wajibah sebagai bagian yang diperoleh untuk anak angkat. Dalam pembagiannya anak angkat dari garis ibu angkatnya mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian x $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{12}$ bagian sedangkan dari garis keturunan ayah angkatnya anak angkat dalam putusan tersebut mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ bagian. Dasar hukum yang menjadi acuan adanya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bagiannya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.³¹

Ketentuan Hukum Hakim dalam Memberikan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya di Indonesia dan memiliki kedudukan yang sederajat dengan peradilan lainnya. Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus yang hanya menyelesaikan perkara-perkara tertentu dan bagi golongan tertentu. Dalam menyelesaikan

³⁰ “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.”

³¹ “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.”

perkara di lingkungan Peradilan Agama sendiri terdapat 13 buah kitab fikih yang semuanya bermazhab Syafi'i sebagai sumber hukum materil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan dan ditangani oleh Pengadilan Agama. Namun sumber hukum ini tentu akan berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan putusan atau disparitas antar Pengadilan Agama sehingga lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial sehingga KHI menjadi hukum positif dan mengikat hakim dalam memutus perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dalam Islam.³²

Guna untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum, hakim menggunakan KHI sebagai sumber hukum untuk memutus perkara dalam Pengadilan Agama. Dalam perkara kewarisan Islam, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat dapat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya sehingga hakim menggunakan hukum ini untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pertimbangan dalam menentukan wasiat wajibah ini adalah demi kemaslahatan dan keadilan baik bagi anak angkat ataupun orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum. Pasal 209 KHI memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkatnya dalam hubungan waris mewarisi. Modifikasi ini berwujud bahwa anak angkat berhak mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya begitupun sebaliknya.³³

Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam Memberikan Wasiat Wajibah pada Anak angkat

Dalam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hakim menentukan pembagian hak pada anak angkat dengan menggunakan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan untuk menetapkan bagian harta waris anak angkat (adopsi). Kehadiran KHI yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap

---

³² Yulkarnain Harahap and Andi Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan," *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 626, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245>.

³³ Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 7.

mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak serta menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia. KHI menjadi sumber hukum materil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak serta hak warisnya dalam lingkup masyarakat Islam di Indonesia.³⁴

KHI hadir dalam Hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi Hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Bentuk-bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan pemberian wasiat wajibah adalah menggunakan kaidah-kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Penerapan kaidah wasiat yang diatur dalam KHI dilakukan dengan 2 alasan yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dan demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.³⁶

Sedangkan dalam pandangan Islam, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak dapat mendapatkan bagian harta waris orang tua angkatnya. Dalam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg ini memberikan hak waris atau bagian harta waris bagi anak angkat yang juga menjadi ahli waris dalam putusan tersebut dengan menetapkan wasiat wajibah. Sehingga dalam padangan hukum Islam putusan pengadilan tersebut masuk pada hukum wasiat namun wasiat dalam Islam sedikit berbeda yaitu pemberiannya tidak wajib bagi selain ahli waris apabila tidak ada wasiat dari pewaris bak itu di sampaikan secara lisan maupun tulisan. Namun karena beberapa pertimbangan dan keinginan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat maka hakim memberikan hak waris pada anak angkat dengan

³⁴ Afriyanto, "Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam," *Fikiran Masyarakat* 3, no. 2 (2015): 85

³⁵ Harahap and Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan."

³⁶ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnian Harahap, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia," *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 312–13.

didasari pasal 209 KHI sebagai sumber hukum yang digunakan dalam memberikan wasiat wajibah pada anak angkat.

Wasiat merupakan produk ijtihad ulama Indonesia yang secara substansi sama dengan wasiat wajibah yang ditujukan kepada anak angkat. Wasiat dalam Hukum Islam tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta waris. Sehingga hal ini memberikan batasan dalam memberikan bagian hak wasiat wajibah kepada anak angkat. Pemberlakuan wasiat wajibah akan mempengaruhi nilai hak warisan dari ahli waris yang lain.³⁷

Dalam putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, anak angkat bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya serta berhak mendapatkan bagian hak warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam putusan tersebut anak angkat mendapatkan harta bagian sebesar 1/12 dari seluruh harta waris. Artinya dalam penetapan ahli waris dan hak waris hakim memutuskan untuk mengikut sertakan atau mengakui anak angkat sebagai ahli waris serta mendapatkan bagian hak waris dengan menggunakan wasiat wajibah sebagai dasar pembagian hak waris anak adopsi.³⁸

Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 37 yang artinya:

“Dan ingatlah, ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “pertahankanlah terus istrimu yang bertakwa kepada Allah” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah yang lebih berhak kamu takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri. Dan ketentuan itu pasti terjadi. (QS. al-Ahzab: 37).³⁹

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan anak angkat dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

³⁷ Afriyanto, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Fikiran Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2015), 85

³⁸ “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.”

³⁹ Ramdhani Ria, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam,” *Lex et Societatis* III, no. 1 (2015): 60.

“Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan dirinya) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Dalam Fiqh Islam, wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran untuk memberikan rasa keadilan pada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syara' tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh. Namun di sisi lain keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya jika hal itu akan memberikan madharat pada ahli waris. Dengan pertimbangan ini ketentuan pasal 209 KHI membahas mengenai wasiat wajibah sesuai dengan teori *masalah al- ummah*. Sehingga anak angkat boleh memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi sebagai berikut⁴¹:

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat hanya dibolehkan dalam sebatas pemeliharaan, pengayoman dan pendidikan dan dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan atau penetapan pengangkatan anak oleh is.
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak melebihi 1/3 harta warisan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah.
3. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak- hak ahli waris. Apabila harta orang tua angkatnya hanya sedikit, belum memadai untuk kesejahteraan ahli warisnya maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak angkat. Memaksakan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja seperti menentang hukum Allah.
4. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, maka harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan anak angkat tersebut berhak atau tidak atas wasiat atau wasiat wajibah tersebut.

⁴⁰ Ibid., 59.

⁴¹ Arum Millati Ahnaf, “Status Penetapan Anak Angkat Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA. JS Dan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA. JK)” (2019).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengangkat anak hukumnya boleh dalam Islam dengan memperhatikan ketentuan atau syarat yang harus terpenuhi. Anak angkat tidak termasuk dalam nasab orang tua angkatnya sehingga hal ini membuat anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun dalam hukum positif di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak waris anak angkat dengan jalan wasiat wajibah sehingga anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan mendapatkan wasiat wajibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan membuat wasiat atau tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat.⁴²

Hal ini dapat memperkuat bahwa keberadaan wasiat wajibah menjadi alasan diwajibkannya wasiat wajibah untuk anak angkat. Walaupun anak angkat bukan merupakan kerabat dekat, namun anak angkat mempunyai keterikatan kasih sayang antara orang tua angkat dan anak angkatnya sehingga dapat dianggap sebagai keluarga walaupun tidak terikat darah.

Dalam putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, jelas bahwa anak angkat mendapatkan bagian warisan yang berasal dari wasiat wajibah. Walaupun tidak ada wasiat dari pewaris, hakim memberikan wasiat wajibah pada anak angkat dengan dasar pasal 209 KHI yang dalam hal ini KHI menjadi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagian wasiat wajibah yang didapatkan oleh anak angkat dalam putusan tersebut mendapatkan $\frac{1}{12}$ dari harta peninggalan sehingga hal ini tidak melanggar ketentuan pemberian wasiat yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian.

Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak (adopsi) memiliki perdebatan yang panjang. Secara Hukum Islam, pengangkatan anak boleh saja dilakukan namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan dan tidak boleh menyamakan

---

⁴² Ade Kurniawan Akbar, "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam," *Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 169.

kedudukannya dengan anak kandung. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedangkan hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 37.⁴³

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dari bunyi ayat tersebut jelas bahwa status anak dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Anak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya karena itu dia hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian pengangkatan anak tidaklah mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya dan tidak pula mengubah hak kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya.⁴⁴

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Karena prinsip pokoknya adalah adanya hubungan darah atau nasab atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut.⁴⁵

Sedangkan dalam hukum positif anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dengan menggunakan wasiat wajibah. Pengaturan wasiat wajibah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen instruksi Presiden. Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkat yang telah meninggal dunia.⁴⁶

---

⁴³ Ria, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 1 (2015).

⁴⁴ *Ibid.*, 60.

⁴⁵ Moh. Nashiruddin Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisnya," *Ummul Qura*, Vol. 15, No. 1 (2020), 15.

⁴⁶ Nugraheni, Ilhami, and Harahap, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 22, (2010).

Dalam lingkup peradilan Agama para hakim menggunakan KHI sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya. Khusus dalam perkara kewarisan Islam, ada beberapa alasan yang digunakan oleh para hakim untuk menggunakan KHI sebagai sumber hukum mengikat dalam memutuskan wasiat wajibah dalam pembagian harta waris untuk anak adopsi adalah:

1. KHI mengikat hakim dalam memutuskan perkara demi untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum.
2. KHI mengikat hakim dalam memutuskan perkara guna menyatukan para hakim ketika memutuskan perkara yang sejenis.
3. KHI mengikat hakim demi mewujudkan kepastian hukum.

Dari beberapa alasan KHI mengikat hakim dalam memutuskan perkara dalam Pengadilan Agama diatas dapat di simpulkan bahwa KHI menjadi sumber hukum utama yang digunakan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak adopsi.

KHI menjadi acuan pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris pada anak angkat (anak adopsi) dari harta warisan orang tua angkatnya sehingga hal ini menjadikan anak adopsi mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum sehingga pembagian waris untuk anak angkat melalui wasiat wajibah ini didasari dengan kemaslahatan dan keadilan baik untuk anak angkat itu sendiri ataupun untuk orang tua angkatnya.

Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan 1/6 bagian dari harta warisan dari ibu angkat, kemudian 1/3 bagian dari harta warisan ayah angkat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dipandang layak dan adil jika bagian dari anak angkat tersebut adalah 1/6 dari harta warisan kedua orang tua angkat.

Perincian pembagian harta waris dalam putusan pengadilan tersebut adalah: $1/6 \times \frac{1}{2} = 1/12$ bagian atau 8,33%, sehingga harta warisan dari ibu angkat yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama setelah dikurangi 1/6 bagian (8,33%)

---

⁴⁷ Ibid., 314-315.

dari anak angkat, sehingga sisanya adalah: $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$ bagian = 41,67 %, kemudian pembagian harta waris dari ayah angkat yaitu $\frac{1}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{144}$ bagian atau 11,81%.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa pembagian harta peninggalan dari ibu dan ayah angkat, masing-masing adalah dikurangi terlebih dahulu dari wasiat wajibah anak angkat sebesar $\frac{1}{6}$ bagian. Sisa dari perhitungan tersebut kemudian dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Jadi dalam putusan pengadilan tersebut, menyatakan bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tersebut adalah sebesar $\frac{1}{6}$, dan karena kedua orang tua angkat telah meninggal, maka anak angkat tersebut mendapat $\frac{1}{6}$ dari masing-masing orang tua angkat. Dalam putusan tersebut hakim juga berperan sangat penting dalam menentukan berapa bagian yang layak diberikan kepada anak angkat, dan pembagian waris anak adopsi tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari yang telah diatur.

KESIMPULAN

Dalam memutuskan pembagian hak waris untuk anak adopsi, hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum dan pertimbangan hukum untuk memberikan hak waris untuk anak adopsi. KHI merupakan hukum yang mengikat hakim dengan beberapa alasan yaitu *pertama*, agar tidak terjadi kekosongan hukum. *Kedua*, agar menjadi pertimbangan hukum para hakim dalam kasus yang sejenis. *Ketiga*, agar memiliki kepastian hukum.

Analisis mengenai putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg yaitu anak angkat menjadi bagian dari ahli waris yang sah namun dengan menggunakan wasiat wajibah sebagai bagian yang diperoleh untuk anak angkat. Karena kedua orang tua angkat telah meninggal, maka anak angkat tersebut mendapat $\frac{1}{6}$ dari masing-masing orang tua angkat. Dasar hukum yang menjadi acuan adanya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bagiannya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Dalam Hukum Islam, seorang anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya namun ia berhak mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan orang tua angkatnya atau wasiat wajibah. Berdasarkan hal tersebut putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg telah sesuai dengan hukum Islam karena anak angkat mendapat $\frac{1}{6}$

bagian dari masing-masing orang tua yang meninggal dan bagian tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Z. "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qu'ran Dan Hadis." 1 (2019).
- Afriyanto. "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Fikiran Masyarakat* 3, no. 2 (2015).
- Ahnaf, Arum Millati. "Status Penetapan Anak Angkat Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA. JS Dan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA. JK)," 2019.
- Akbar, Ade Kurniawan. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019).
- . "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 169.
- Alfun Ni'matil Husna. "Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," 2017.
- Amin, Moh. Nashiruddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisnya." *Ummul Qura* XV, no. 1 (2020): 26–27.
- . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisnya." *Ummul Qura* XV, no. 1 (2020): 15.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2014. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.
- Fahmi, Mifa Al. "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 87. Fathoni, M alfan. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat," 2018.
- Fitriyani, Nia. "Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis." Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, n.d.
- Habiburrahman. "Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 129.
- Harahap, Yulkarnain, and Andi Omara. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245>.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jamal, Ridwan. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat." *Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006).
- Jiiy Ji'ronah Muayyanah. "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," 2010. Karaluhe, Sintia Stela. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Dijinjau Dari Hukum Waris." *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016).
- . "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum

- Waris." *Lex Privatum IV*, no. 1 (2016): 173.
- Mahfiyyah, Hikmatul. "Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa." Universitas Jember, 2016.
- Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum IV*, no. 55 (2016).
- Moh. Nashiruddin Amin, Abd Hadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisannya." *Ummul Qura XV*, no. 1 (2020): 15.
- Nareswari, Ida Ayu Made Manik. "Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kertha Wicara 10*, no. 2 (2021).
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnian Harahap. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum 22*, no. 1 (2010).
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Putra, Rahmad Riski. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Di Tinjau Dari Hukum Adat Aceh Dan KHI (Studi Di Dalam Masyarakat Adat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara)." Sumatera Utara, 2019.
- "Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg." 2018.
- Rahmadhanty, Karin Aulia. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." *Normative 6*, no. 2 (2018): 68.
- Ria, Ramdhani. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Lex et Societatis III*, no. 1 (2015): 60.
- Suyanti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Islam." *An-Nuha 7* (2020): 98.
- Weni Sarlina. "Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia," 2020.